

## ALASAN JEPANG MENJADI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN

### 4.1 Diplomasi Jepang di Lingkungan Internasional

Di dalam diplomasi internasional kemampuan dalam bernegosiasi adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan kemenangan diplomasi. Dengan kemenangan diplomasi internasional yang diperoleh, sebuah negara akan dapat menunjukkan kekuatannya sebagai negara berdaulat yang kuat di dalam pergaulan lingkungan internasional. Kemampuan bernegosiasi ini juga diukur melalui seberapa pandai pemerintah negara dalam melobi pihak-pihak berpengaruh yang memungkinkan kesepakatan negosiasi tercapai. Micheal Blaker dalam *Japanese International Negotiating Style* (1977:207) menyatakan bahwa,

“Kemenangan sebuah negosiasi disebabkan oleh adanya kekuatan aplikasi tawar-menawar yang efektif, yang kemudian diharapkan dapat menghasilkan negosiasi yang baik”.

Lobi di dalam diplomasi multilateral memiliki arti sebagai;  
*Lobbying may have the object of preparing the ground for a new negotiation, supplementing a current one, or among other things, trying to influence a vote at the United Nations.* (G. R. Berridge 2005: 123)

Terjemahan: Lobi memiliki obyek yang menyiapkan sebuah landasan untuk suatu negosiasi baru, menambahkan arus yang baru, atau di antaranya, berusaha untuk mempengaruhi suatu suara di negara-negara yang dipersatukan /PBB.

Dalam perjalanan sejarah Jepang, pola diplomasi Jepang sebelum Perang Dunia II berakhir dikenal sangat keras. Hal ini menjadikan Jepang dikenal sebagai negara yang pernah sangat berhasil menjadi negara ekspansionis yang berasal dari kawasan Asia Timur. Hal ini juga dapat dilihat jauh pada masa sebelum perang yaitu pada masa kekuasaan Tokugawa di mana Jepang melakukan politik isolasi (*sakoku*) yang sangat konsisten, karena selama lebih dari dua ratus tahun Jepang

gigih melaksanakan politik isolasi yang secara berturut-turut diperintah oleh keturunan keluarga Tokugawa.<sup>1</sup>

Pola diplomasi yang dilakukan Jepang di dunia internasional tidak terlepas dari kepentingan politik dalam negeri Jepang sendiri, yang tentunya dilatarbelakangi oleh nilai sejarah, sosial dan budaya yang dimiliki oleh Jepang sebagai sebuah negara. Politik *Sakoku* sendiri misalnya, telah dianggap mampu membangun karakter politik Jepang sebagai negara feodal yang kuat.

Karakter politik lainnya yaitu ketika masih berlangsungnya Perang Dingin, dimana Jepang harus menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebijakan politik luar negerinya sebagai akibat terjadinya persaingan dua kekuatan adidaya dunia. Keadaan dunia ketika itu diliputi oleh berlangsungnya persaingan ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Jepang terpaksa harus cepat menyesuaikan kebijakan luar negerinya sehubungan dengan terjadinya perkembangan baru di dunia internasional yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional. Pola diplomasi yang dilakukan Jepang ini yaitu diplomasi penyesuaian yang dikenal dengan karakter "*siawase*" atau "*flexibility*".

Politik fleksibilitas atau *siawase* menurut Michael Blaker dalam *Japanese International Negotiating Style* (1977; 44), adalah suatu kebaikan dari proses negosiasi atau realisme, di mana adanya kesediaan untuk melakukan penyesuaian secara objektif dan dengan cara yang praktis. Hal ini tentu saja untuk meningkatkan kekuatan Jepang baik secara nasional maupun internasional.

Pada masa Perang Dunia II berakhir, Jepang secara perlahan mulai menyadari bahwa untuk dapat berinteraksi dalam lingkungan internasional yang lebih luas Jepang harus mampu menghadapi kondisi-kondisi dunia yang terjadi pada saat itu, artinya Jepang harus memiliki kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri yang cepat terhadap situasi baru dunia.

Ozawa Ichiro dalam (1993: 113-114), menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II Jepang menetapkan Lima pokok garis besar politik luar negerinya sebagai upaya menstabilkan hubungan internasional yang berlangsung antar negara-negara di seluruh kawasan internasional. Lima pokok garis besar tersebut adalah;

---

<sup>1</sup> Mengenai Politik Sakoku Jepang lihat; Mikiso Hane, *op.cit*, hal. 26-82

1. Memperhatikan kepentingan nasionalnya, yaitu menjadikan tujuan dasar dari politik luar negeri Jepang adalah untuk kepentingan dalam negeri Jepang sendiri.
2. Partisipasi global, artinya sebagai negara maju Jepang memiliki tanggung jawab untuk ikut serta membangun kerjasama internasional yang tidak sebatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga politik.
3. Tujuan-tujuan diplomatik, yaitu menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat yang memiliki tujuan diplomasi yang mapan dengan cara mengembangkan kemampuan strategi untuk mencapainya.
4. Aliansi Amerika Serikat-Jepang, yaitu Jepang harus kembali mempertahankan hubungannya dengan AS sebagai tonggak untuk mewujudkan keamanan dan kemakmuran negara Jepang.
5. Kawasan Asia-Pasifik, yaitu Jepang harus mengakui arti penting kawasan Asia Pasifik. Di mana hal ini merupakan bentuk diplomasi “pilar kembar” Jepang sebagai anggota dalam komunitas Asia-Pasifik dan juga kelompok negara-negara demokrasi maju.

Diplomasi yang dilakukan Jepang di dunia internasional sampai saat ini masih banyak menuai kritik, hal ini dikarenakan karakter diplomasi Jepang yang masih bersifat “*risk minimization*”, yaitu berupaya seminimal mungkin untuk mengambil resiko dalam setiap keterlibatannya di dunia internasional. Hal ini dapat dilihat melalui bentuk diplomasi Jepang yang dilakukan melalui kontribusi ekonomi, yang sudah dilakukan Jepang sejak Perang Dunia II berakhir, seperti yang dikemukakan oleh R. Nester. (1992:47)

*“The Japanese approach to diplomatic negotiation is dominated by a philosophy of risk minimization and confrontation avoidance. And so does in Japanese diplomacy its economic power is a strategic instrument that must give maximum benefit to Japan interests.”*

Dalam mengamati pola diplomasi suatu negara tidak terlepas dari latarbelakang budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sawyer dan Guetzkow (1965:18), yang mengatakan bahwa, Perbedaan budaya menghasilkan Gaya negosiasi yang berbeda.

Robert Jackson dan Sorensen (2005; 37), mengatakan bahwa, “sistem negara merupakan lambang historis, yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Sistem dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut.”

Michael Blaker (1977:4-8) dalam bukunya *Japanese International Negotiating Style* memaparkan beberapa Gaya diplomasi Jepang sebagai berikut yaitu:

1. *jiyuu kodo (Freedom of action)*. Yaitu hasrat Jepang dengan kekuatannya untuk menentukan nasibnya sendiri; diplomasi ini merupakan bentuk diplomasi Jepang yang ingin menentukan kebijakan pemerintahannya secara independen dan terlepas dari segala bentuk campur tangan asing.
2. *happo bijinshugi (Looking pretty for everyone)*. Yaitu upaya untuk terlihat baik atau indah untuk semua orang; artinya Jepang sangat mempertimbangkan apa yang menjadi opini publik.
3. *Enryo Gaiko (Restrained diplomacy)*. Yaitu diplomasi yang dikendalikan; dimana ada kecenderungan pemerintahan Jepang untuk selalu mengendalikan setiap kebijakan dalam pemerintahannya sehingga cenderung otoriter.
4. *kiken kaihi (Risk avoidance)*, diplomasi menghindari resiko; yaitu dalam mengambil kebijakan Jepang selalu mempertimbangkan dampak dan keuntungannya bagi Jepang

Blaker juga menyebutkan Lima norma-norma yang diberlakukan Jepang dalam bernegosiasi yaitu:<sup>2</sup>

1. *Overcoming domestic opposition*; yaitu suatu upaya untuk menanggulangi oposisi domestik (pertentangan dalam negeri), untuk memaksimalkan otonomi dan memperkecil resiko, setiap Pemerintah Jepang merasa mengalahkan hambatan dari oposisi asing dan dalam negeri merupakan hal yang penting.

Hal ini dapat terlihat pada pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang Mutsu Munemitsu yang menyatakan,

*“No matter how much we are opposed at home, we are determined to carry through unhesitatingly with resolve, believing as we do in our government's determination and our true national interest”*<sup>3</sup>

2. *Dispelling western resistance*; yaitu suatu bentuk ketidakpercayaan Jepang terhadap campur tangan Barat, dan ini merupakan suatu bentuk sikap Jepang yang harus selalu bersikap waspada dan curiga terhadap campur tangan asing.
3. *Secrecy*; yaitu norma kerahasiaan yang selalu dipegang teguh Jepang dalam melakukan negosiasi, hal ini dipercayai Jepang sebagai hal yang paling krusial dalam menentukan keberhasilan negosiasi Jepang
4. *Careful deliberation*; deliberasi yang hati-hati, artinya Jepang harus mampu mengatasi kelemahan nasional yang menguasai Jepang, dan mengajak Jepang untuk lebih waspada, hati-hati dalam melakukan negosiasi untuk kebaikan Jepang
5. *Situational adaptation*; yaitu merupakan bentuk diplomasi prasyarat yang harus dilakukan Jepang dalam menjalankan kebijakannya yaitu haruslah dapat menyesuaikan diri terhadap situasi baru.

<sup>2</sup> Michael Blaker, *op. cit*, hal.14-21

<sup>3</sup> Micheal Blaker, *Ibid*, hal. 17

Hook, Gilson, Hughes, dan Dobson Dalam *Japan's International Relations* (2005: 25) Menyebutkan beberapa macam gaya diplomasi Jepang sebagai berikut:

1. *Emperor diplomacy* (Diplomasi Kaisar, yaitu melalui ajaran nasionalisme dan kesetiaan untuk mengabdikan pada Kaisar dan negara)
2. *Resource diplomacy* (Diplomasi sumber daya yaitu melalui ekonomi, teknologi, informasi dan segala sesuatu yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya negara)
3. *Gift bearing diplomacy* (Diplomasi hadiah, yaitu pemberian penghargaan terhadap keberhasilan dan pengabdian yang telah dilakukan seseorang)

Dengan melihat beberapa karakter pola diplomasi yang dilakukan Jepang dalam bernegosiasi dan berinteraksi di lingkungan internasional di atas, maka upaya-upaya yang dilakukan Jepang dalam memenangkan diplomasi internasionalnya dapat tercermin melalui budaya politik Jepang. Seperti apa dan melalui upaya apa Jepang berusaha memenangkan diplomasinya agar tercapai keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat dilihat melalui beberapa upaya yang dilakukan Jepang yaitu diantaranya melalui diplomasi ekonomi, bantuan (ODA) dan partisipasi militer (SDF) melalui PKO seperti berikut ini:

i. **Melalui Diplomasi Ekonomi**

*“There are four functions which diplomacy in this broad sense performs for their international actor: communication; negotiation; participation in multilateral institutions; and the promotion of economic goods”.*<sup>4</sup>

Pada masa tahun 1990-an Jepang mulai berusaha merumuskan kebijakan baru dengan melakukan identifikasi kepentingan internasionalnya dalam upaya menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dunia. Jepang mulai meningkatkan peran politiknya di dunia internasional agar sebanding dengan kemampuan yang

---

<sup>4</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, Pelgrave Macmillan, New York, 2003, hal. 139

dimiliki oleh negara-negara demokrasi yang terlebih dahulu mengalami kemajuan baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

Ditandainya keadaan dunia yang semakin kompleks yang menuju ke arah multilateralisme, hal ini menyebabkan negara-negara di dunia semakin memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dalam menghadapi globalisasi ini Jepang berupaya menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya dengan memperhatikan berbagai isu baru yang menjadi perhatian dunia seperti prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Bantuan kemanusiaan, Terorisme, Perlucutan Senjata, Pasukan Perdamaian, dan sebagainya.

Dengan meluasnya kepentingan-kepentingan negara, maka untuk dapat mengatasi permasalahan yang semakin kompleks keberadaan organisasi internasional khususnya Organisasi PBB yang dianggap sebagai organisasi bentuk istimewa karena menangani permasalahan dunia secara luas baik dari permasalahan ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, hak asasi, dan kemananan, telah menjadi alat penting bagi semua negara untuk dapat ikut serta berperan aktif dalam memberikan kontribusinya baik dalam permasalahan ekonomi maupun politik.

Diplomasi ekonomi yang dijalankan Jepang semenjak tahun 1980-an merupakan bentuk usaha pemerintahan Jepang dalam upaya membangkitkan negaranya yang kalah akibat perang. Jepang meyakini bahwa dalam pencapaian perolehan-perolehan ekonomi telah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan diplomasinya di dunia internasional. Bagi Jepang memperkuat negaranya dengan meningkatkan kemakmuran ekonomi akan lebih mempermudah Jepang dalam melakukan proses tawar menawar dalam upaya memenangkan diplomasi di lingkungan internasional.

Dalam organisasi internasional seperti PBB misalnya, dengan keberhasilan Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS, ini menjadikan Jepang mampu memberikan anggarannya kepada PBB secara penuh. Seperti yang terlihat dalam pernyataan MOFA Jepang dalam sidang laporan yang ke 49 tahun, pada tahun 1995, yang menyatakan bahwa; “...*Japan, for its part, has promptly fulfilled its financial obligations under the U.N. Charter.*”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “*United Nations and Japan*”, Ministry of Foreign Affairs, 1995. hal. 29

Berikut adalah bentuk dari kontribusi-kontribusi Jepang sebagai pemberi anggaran terbesar ke-dua setelah AS:

**Tabel 4.1 Kontributor-kontributor Utama Anggaran PBB Tahun 1995**

Rank	Negara	Kontribusi (US \$)	Total Persen (%)
1	U.S.A.	135,027,985	25.00
2	Jepang	152,442,506	13.95
3	Jerman	97,694,337	8.94
4	Prancis	69,063,558	6.32
5	Russia	62,069,780	5.68
6	U.K.	57,589,390	5.27
7	Italy	52,344,057	4.79
8	Canada	33,548,279	3.07
9	Spanyol	24,478,223	2.24
10	Brazil	17,703,001	1.62
11	Belanda	17,265,889	1.58
12	Ukraina	16,173,112	1.48
13	Australia	15,954,555	1.46
14	Swedia	13,331,889	1.22
15	Belgia	10,818,500	0.99
16	Austria	9,288,612	0.85
17	Rep. of Korea	8,742,223	0.80
18	Saudi Arabia	8,742,223	0.80
19	Meksiko	8,523,666	0.78
20	China	7,868,000	0.72
Total	(185 Negara)	1,134,628,998	100 %

Sumber: *United Nations and Japan 1995*

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi-kontribusi yang Diberikan Negara Anggota PBB kepada Anggaran PBB**

Negara	1974	1980	1986	1992	1998	2000	2001	2002
USA	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	22.0	22.0
Jepang	7.2	9.6	10.8	12.5	18.0	20.6	19.6	19.7
Jerman	7.1	8.3	8.3	8.9	9.6	9.9	9.8	9.8
Prancis	5.9	6.3	6.4	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5
Russia	13.0	11.1	10.2	6.7	2.9	1.1	1.2	1.8
Lainnya	41.8	39.7	39.3	40.9	38.0	36.9	40.8	40.8

Sumber: *Facts and Figures of Japan 2002*

Sampai pada tahun 2006-2007 menurut *United Nations Handbook 2007*, Jepang tetap secara konsisten memberikan anggaran kepada PBB dengan menjadi kontributor keuangan terbesar ke dua setelah Amerika Serikat, berdasarkan data yang diperoleh yaitu Amerika memiliki total anggaran sebanyak 22.000 persen, dan Jepang berada di urutan kedua dengan total anggaran sebanyak 16.624 persen.

Adapun bentuk perjalanan kontribusi ekonomi Jepang di lingkungan internasional dapat dilihat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jepang tergabung dalam IMF pada tahun 1952;
2. Jepang tergabung dalam *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, pada tahun 1952 sebagai negara poros yang kalah akibat Perang Dunia II;
3. Jepang bergabung dengan Bank dunia pada tahun yang sama yaitu 1952;
4. Jepang tergabung dalam *Asian Development Program* pada tahun 1966;
5. Jepang secara resmi tergabung sebagai “*rich man club*” ke dalam kelompok *Organization for Economic Cooperation and Development* dan *Development Assistance Committee* pada tahun 1964.
6. Jepang tergabung dalam (OECP) *Overseas Economic Cooperation Fund* pada tahun 1982-1992;

7. Pada masa periode yang sama Jepang juga tergabung dalam (IFC) *International Finance Corporation*, dan (MIGA) *Multilateral Investment guarantee Agency*;
8. Jepang tergabung dalam (UNDP) *United Nations Development Program* pada tahun 1990;
9. Jepang menjadikan ODA Jepang sebagai pilar utama kebijakan luar negeri Jepang pada tahun 1970.<sup>6</sup>

Jepang menempatkan diplomasi ekonominya dalam arti yang tertinggi, diplomasi ekonomi Jepang dirancang untuk menemui kecenderungan utama yang terjadi di dalam situasi internasional sebagai upaya kolaborasi mengakrabkan Jepang dengan negara –negara bebas lainnya. Dengan keberhasilan ekonominya ini Jepang menjalankan diplomasi internasionalnya melalui kontribusi ekonomi yang salah satunya adalah melalui upaya bantuan internasional, yang juga merupakan instrumen ekonomi yang dikenal ampuh berperan menjadi taktik diplomasi yang sangat diperhitungkan oleh Jepang.

## ii. Melalui Diplomasi Bantuan Internasional ODA

Jepang memahami sekali pentingnya peranan organisasi Internasional seperti PBB, untuk itu setelah Perang Dunia II Jepang merubah haluan kebijakan luar negerinya dengan cara melakukan diplomasi ekonomi. Salah satu instrumen dari ekonomi adalah melaksanakan pemberian bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang dan kepada organisasi-organisasi internasional, yang antara lain berbentuk bantuan melalui ODA (*Official Development Agency*). Sehingga pada tahun 1990-an Jepang telah berhasil menjadi negara pemberi donor yang terbesar di dunia. Hal ini tentu saja bukan hanya menjadi bentuk “amal” semata, tetapi justru merupakan “alat” dari kebijakan politik luar negeri Jepang.

Jepang memberikan perhatian pada politik luar negerinya setelah perang yaitu dengan memberikan kontribusi internasional yang bukan bersifat militer, tetapi dalam bentuk bantuan yang merupakan kunci *survival* Jepang dalam upaya

<sup>6</sup> Sadako Ogata, “*Shifting Power Relations in Multilateral Development Banks*,” *The Journal of International Studies*, 1989, hal 10-15

mensejajarkan negaranya dengan negara-negara maju dan mendapatkan pengakuan dari seluruh masyarakat internasional, dan juga sebagai upaya memulihkan namanya dari masa peperangan dahulu.

ODA mencerminkan beberapa hal yaitu;<sup>7</sup>

1. Pembangunan multilateral yang berhubungan dengan kebijakan organisasi internasional;
1. Menegaskan kebijaksanaan politik luar negeri Jepang sebagai negara yang muncul menjadi kekuatan ekonomi pada tahun 1980-an;
2. Upaya untuk membatasi aktor non government;
3. dan untuk membentuk opini publik.

Dengan banyaknya kontribusi yang diberikan Jepang secara finansial, Jepang berupaya untuk dapat memperbaiki sejarah yang pernah dituliskan Jepang pada masa Perang dahulu. Dan hal ini juga membuat Jepang lebih konsisten dalam upaya memperkuat “*financial foundation*” untuk diberikan kepada organisasi dunia seperti PBB yang bertujuan untuk mempertahankan berdirinya institusi keuangan dunia secara internasional.

Walaupun dalam perjalanannya diplomasi ekonomi yang dijalankan Jepang ini menuai kritik karena diplomasi ini dianggap bersifat reaktif dan kurang memberikan kontribusi yang luas dalam permasalahan politik dunia, namun dengan status Jepang yang berhasil menjadi “*financial supporter*” terbesar, Jepang mampu memberikan kontribusi yang besar dalam membantu mencapai tujuan dari PBB. Hal tersebut meyakini Jepang bahwa Jepang berhak untuk dapat memainkan peranan yang lebih aktif lagi di lingkungan organisasi internasional dalam hal ini yaitu keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB.

Kekuatan ekonomi yang dijadikan alat diplomatik bagi Jepang dalam upayanya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini akhirnya menjadi dasar philosophy Jepang dalam menjalankan peran multilateralnya di

---

<sup>7</sup> Dennis T. Yasutomo, *The New Multilateralism in Japan Foreign Policy, State-Centered Explanations*, St. Martin's Press, New York, 1995, hal. 54

organisasi internasional seperti yang dinyatakan oleh Ministry of Foreign Affairs bahwa,

*“The thinking now is that Japan is to contribute to the world, and then we should do it through international institutions. This applies not just to aid but to foreign policy in general ....there is a tendency to favor international institutions, and development aid is no exception”*<sup>8</sup>

Terjemahan: Pemikiran sekarang adalah bahwa Jepang disiapkan untuk berperan kepada dunia, kemudian kita perlu melakukan itu sampai ke organisasi internasional. penerapan ini tidak hanya berlaku untuk membantu tetapi sampai pada kebijakan asing secara umum .... ada suatu kecenderungan untuk menyukai organisasi internasional, dan bantuan pengembangan tidak ada perkecualian.

Dengan kemajuan yang semakin pesat dalam bidang komunikasi dan ketergantungan antar negara semakin besar maka kekuatan politik saja tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kekuatan ekonomi. Menurut Joseph Frankel (dalam L.S Roy Diplomacy, 1991:10) mengatakan bahwa, “instrumen ekonomi sangat luas diterapkan dalam waktu perang dan damai: yaitu seperti perdagangan internasional dan bantuan internasional digunakan sebagai alat diplomasi yang memudahkan pada masa damai, dan instrumen ekonomi merupakan langkah besar untuk menuju kearah internasionalisasi.”

Faktor ekonomi telah memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan diplomatik, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadikan negara-negara berkembang memiliki ketergantungan terhadap negara-negara maju disinilah diplomasi bantuan memegang peranan yang sangat besar dan Jepang sebagai negara yang mampu bangkit secara ekonomi setelah kekalahannya pada Perang Dunia II sangat menyadari hal itu.

Diplomasi ekonomi telah dimulai Jepang pada masa 1980-an sampai 1990, di mana Jepang mulai mengkonsentrasikan pemberian bantuan untuk program pengembangan di Asia. Adapun beberapa tujuan dari diplomasi ekonomi yang dilakukan Jepang yaitu sebagai:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <http://www.asahi.com/english>. 16 juni 2007

<sup>9</sup> Dennis T. Yasutomo, *op. cit*, hal. 62-63

- 1) *Policy Articulation*; yaitu suatu bentuk artikulasi kebijakan yang bertindak sebagai saluran untuk mengartikulasikan dan menerapkan kebijakan nasional. Hal ini untuk mengartikulasikan, kebijakan Jepang yang mana telah di mulai untuk dirumuskan dari pertengahan tahun 1980-an.
- 2) *Legitimization of controversial policies*; Untuk legitimasi kebijakan kontroversial yang terjadi di dalam negeri Jepang, Yaitu kebijakan Jepang dalam upaya menengahi resiko diplomatik dengan menyalurkan kebijakan sampai organisasi multilateral, yang dijadikan suatu siasat bermanfaat untuk kedua-duanya baik secara internasional dan secara domestik.
- 3) *Fulfillment of international responsibilities as a nonmilitary*; Untuk pemenuhan tanggung-jawab internasional Jepang melalui gerakan nonmiliter, kebijakan ini menggunakan perasaan cinta damai yang kuat di dalam semangat Jepang dan juga sebagai upaya menghapus ketakutan negara-negara lain terhadap tumbuhnya peran militer Jepang di daerah kawasan dan sebagai upaya politik global.
- 4) *Enhancement of inadequate national resources*; karena perolehan sumber daya nasional Jepang yang tidak cukup. Jepang mungkin adalah negara kreditur dunia paling besar, tetapi itu saja masih belum cukup, oleh karenanya Jepang harus berjuang keras untuk mengatasi defisit anggaran yang besar.
- 5) *Compensation for diplomatic and policymaking shortcomings*; Untuk menjalankan diplomasi strategis politik Jepang sehabis perang, dan memperkecil gap yang besar dalam hubungannya dengan negara-negara lain.
- 6) *Globalization of diplomacy without sacrificing the priority*; untuk menjalankan globalisasi diplomasi tanpa mengorbankan prioritas. Jepang dapat terlibat dalam beban global yang dikontribusikannya sampai kepada bank dunia dan bank pembangunan regional pada waktu yang bersamaan, dan juga tidak meninggalkan perhatiannya pada Asia.

- 7) *Greater independence within an American policy framework*; untuk memperoleh kemerdekaan yang lebih besar di dalam suatu Kerangka Kebijakan Amerika. Jepang harus meninggalkan ketergantungan tradisionalnya pada Amerika Serikat, yaitu dengan membentuk suatu kepercayaan diri nasional yang baru.
- 8) *Enhancement of national prestige*. Untuk Meningkatkan gengsi nasional. Ini adalah suatu inti dari sasaran kebijakan Jepang dalam semua organisasi internasional, dengan meningkatkan penilaian yang baik secara objektif di mata seluruh organisasi internasional, sehingga status internasional Jepang meningkat dan akan memperkuat posisinya di seluruh organisasi internasional.

Jepang menyadari bahwa kekuatan suatu negara akan tergantung pada kekuatan sumberdaya ekonominya. Diplomasi ekonomi ini juga merupakan cara aman yang dilakukan Jepang dalam upayanya untuk melibatkan diri dalam lingkungan internasional dan untuk memperkuat posisinya di organisasi internasional PBB khususnya di Dewan Keamanan PBB.

Menteri Luar Negeri Jepang Kawaguchi, memberikan pernyataannya pada saat menghadiri sidang umum yang ke 59<sup>th</sup> pada tahun 2004, menurutnya “PBB harus mempertimbangkan kemungkinan Jepang untuk dapat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hal ini dilihat dari banyaknya kontribusi yang telah dilakukan Jepang dalam memberikan kontribusi bantuan di bidang ekonomi kepada seluruh komunitas dunia dan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.”(BlueBook 2005: 144)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koizumi pada September 2004, yang menuntut reformasi PBB, dan mengungkapkan agar PBB mempertimbangkan peran dan kontribusi yang telah diberikan Jepang dalam program bantuan kemanusiaan, dan keberhasilan yang telah dicapai Jepang sebagai pendonor terbesar ke dua di PBB. (Diplomatic Blue Book, 2005: 143).

Untuk menguji kelayakan Jepang untuk dapat duduk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Jepang ingin dilihat dari perannya dalam masalah ekonomi, dimana Jepang mengharapkan masyarakat internasional dapat mempertimbangkan hal tersebut seperti melalui bantuan ekonomi, bank dunia, dan aktivitas multilateral lainnya yang telah diberikan Jepang. Karena bagi Jepang hal itu semua telah mencerminkan tanggung jawab Jepang kepada dunia global.<sup>10</sup>

Status politik yang lebih besar yang diinginkan oleh Jepang berada di belakang keinginannya untuk mencapai tempat duduk yang permanen pada dewan keamanan PBB. keinginan itu semakin kuat sejak Jepang berhasil menjadi suatu kekuatan ekonomi yang utama dan menjadi penyokong keuangan paling besar yang kedua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Fujita, 1995:437), Jepang mempunyai kedua-duanya yaitu kehendak dan kemampuan untuk membahu suatu tanggung jawab yang setaraf dengan kekuatan ekonominya. Jika kesepakatan di antara orang-orang muncul dari arus deliberasi, Jepang tentu saja perlu menunjukkan suatu sikap yang positif ke arah keanggotaan tetap Dewan Keamanan.

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Kawaguchi dalam pidatonya pada MOFA tahun 2004 mengenai kontribusi yang telah diberikan Jepang kepada negara-negara Eropa sampai ke wilayah Balkan yang menyatakan bahwa;

*“Japan has actively promoted ‘peace consolidation diplomacy’. We regard ‘peace consolidation and nation building’ as one of the pillars of our international cooperation. To date Japan has extended economic cooperation totaling 1.8 billion US dollars to South Eastern Europe, including the Western Balkans. In providing this assistance, we have placed importance on contributing to ‘peace building’ in the Western Balkan region while reflecting the concept of ‘human security’.”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Takeshi Inoguchi, Takeshi inoguchi, *Japan’s foreign policy in an era of global change*, Pinter publisher ltd, London, 1993, hal.146

<sup>11</sup> Glenn D Hook, *op. cit*, hal.334

Sampai saat ini hal yang terpenting bagi masyarakat internasional adalah untuk mempersatukan dan mempromosikan upaya mengarahkan konsolidasi damai. Terdiri atas tiga faktor: (1) promosi proses perdamaian; (2) pengamanan stabilitas domestik dan keamanan; (3) menciptakan kehidupan yang tenang (berperikemanusiaan dan bantuan rekonstruksi). Berdasarkan hal tersebut, Jepang mendukung upaya untuk “konsolidasi damai dan pembangunan kebangsaan”, seperti salah satu dari tiang diplomasinya dalam kerjasama internasional adalah, sebagai pemanfaatan alat diplomatik, seperti bantuan ODA, yang dilakukan untuk membuat usaha spesifik dalam menciptakan perdamaian bersama-sama dengan negara-negara yang dipersatukan yaitu PBB. (Blue Book, 2005: 147)

Dalam sejarahnya pada tahun 1990-an, kontribusi ekonomi Jepang telah menarik banyak perhatian di mana keberhasilan dari bentuk diplomasi ini mulai diperhitungkan dalam organisasi PBB. Ketika tahun 1980-an PBB dan masyarakat internasional ramai mempertanyakan kontribusi dan keterlibatan militer Jepang di PBB, kontribusi ekonomi Jepang kurang mendapat perhatian. Walaupun akhirnya pada kenyataannya Jepang hadir sebagai finansial supporter terbesar kedua setelah AS. Berikut adalah mengenai diplomasi ODA Jepang yang telah mengalami perkembangan kebijakan dari waktu ke waktu.

### **3.1.2.1 Kebijakan ODA**

Setelah masa perang berakhir Jepang dengan cepat bangkit dan mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan dan kekalahan akibat Perang Dunia II. Akhir tahun 1950-an barulah Jepang dengan sukses memperbaiki negaranya dan mulai memasuki era “keajaiban ekonomi.” Keberhasilan ini dilatarbelakangi dengan adanya sumber daya manusia yang baik, sistem pendidikan yang baik, pemerintahan yang kuat, dan juga adanya kebijakan ekonomi yang baik.

Selain dari itu, keberhasilan itu juga disebabkan dengan adanya bantuan luar negeri, yang dilakukan secara bilateral antara Amerika dan Jepang selama periode 1945-1952, yang disediakan oleh Bank Dunia. ODA sendiri lahir pada tahun 1950 dan mulai direfleksikan pada tahun 1960-an sebagai kebijakan nonpolitik. Karena dari waktu ke waktu Jepang terus tumbuh sebagai negara berkembang dan terus menerus memberikan pinjaman dan bantuan kepada

negara-negara lain, maka ODA mendapatkan status sebagai kekuatan Jepang di mulai pada tahun 1954. Adapun empat perkembangan dari evolusi kebijakan ODA Jepang yaitu;

1. Pertama untuk membangun kembali negaranya yang bangkrut akibat kalah perang
2. Sebagai strategi politik yang terhubung dengan misi operasi perdamaian PBB.
3. Membangun kerjasama dengan negara-negara Asia;
4. Strategi politik untuk memperkuat posisinya dalam organisasi internasional.<sup>12</sup>

Bagaimanapun Jepang baru dianggap memainkan peranan yang penting dalam organisasi internasional PBB pada masa 1990-an, pada tahun itu kontribusi Jepang di PBB dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kursi tetap Dewan Keamanan PBB. Sehingga diplomasi Jepang di PBB dapat secara konsisten dilihat melalui dua cara yaitu melalui program bantuan dan pasukan perdamaian karena pada tahun 1990-an pemerintah Jepang juga mulai mencanangkan perubahan pada peranan militer Jepang yaitu SDF (*Self Defense Force*).

### **3.1.2.2. Kontribusi ODA Jepang**

Perdana Menteri Jepang Toshi Kaifu mengumumkan beberapa kebijakan di dalam menjalankan ODA sebagai upaya memberikan kontribusinya di PBB sebagai berikut;

1. Trends in military expenditure;
2. Trends in the development, production, etc., of weapons of mass destruction such as atomic weapons and missiles;
3. Trends in the export and import of weapons;

---

<sup>12</sup> Dennis T. Yasutomo, *op. cit*, hal. 5

4. Effort of promoting democratization, the introduction of a market-oriented economy, and the security of basic human rights and freedoms.”<sup>13</sup>

Dilihat dari banyaknya ODA yang diberikan oleh masing-masing negara menurut peringkat pada tahun 1999 Jepang menempati urutan pertama dalam memberikan bantuan ODA kepada negara-negara lain:

**Tabel 4.3 Kontribusi ODA Menurut Peringkat Pada Tahun 1999**

Negara	Jumlah membayar (US \$ million)	Total Bagian (%)	Perbandingan ke GNP (%)	Jumlah Per Kapita (US \$)
Jepang	15,323	27,4	0,35	121,0
USA	9,135	16,3	0,10	33,5
Prancis	5,494	9,8	0,38	95,4
Jerman	5,478	9,8	0,26	67,2
UK	3,279	5,9	0,23	57,2
Belanda	3,134	5,6	0,79	198,2
Italy	1,750	3,1	0,15	31,6
Denmark	1,724	3,1	100	325,8
Lainnya	10,698	19,1	---	-----
Total	56,015	100,0	0,24	-----

Sumber: *Japan's ODA Annual Report 1999 by MOFA*

Berdasarkan periode tahun, peranan Jepang dalam memberikan bantuan ODA terus menduduki peringkat dua besar bahkan seringkali ODA yang diberikan Jepang melampaui Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara ekonomi kuat pertama, berikut adalah gambarannya dari tahun 1994:

<sup>13</sup> Ministry of Foreign Affairs, *Diplomatic BlueBook 1991* (Tokyo: The Japan Times, 1992). hal. 131

**Tabel 4.4**  
**Kontribusi ODA Menurut Peringkat dari Tahun 1994 sampai 2003**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
US	9,927	7,367	9,377	6,878	8,786	9,145	9,955	11,426	13,290	16,254
Jepang	13,239	14,489	9,439	9,358	10,640	12,162	13,508	9,847	9,283	8,880
Prancis	8,466	8,443	7,451	6,307	5,742	5,639	4,105	4,198	5,486	7,253
Jerman	6,818	7,524	7,601	5,857	5,581	5,515	5,030	4,990	5,324	6,784
UK	3,197	3,202	3,199	3,433	3,864	3,426	4,501	4,579	4,924	6,282
Italy	2,705	1,623	2,416	1,266	2,278	1,806	1,376	1,627	2,332	2,433
Canada	2,250	2,067	1,795	2,045	1,707	1,706	1,744	1,533	2,006	2,031

Sumber: *Japanese Diplomacy and Global Affairs in 2004 by MOFA*

Jepang juga ikut berperan dalam memberikan bantuan kepada organisasi-organisasi internasional yang berada di bawah payung PBB, seperti UNICEF, WHO dan lain sebagainya. Dengan demikian dalam kontribusi ekonomi, Jepang telah berhasil menjadikan kebijakan ekonomi sebagai perhatian yang utama sebagai pilar diplomasinya di PBB. Jepang menegaskan bahwa kontribusi ekonomi seperti ODA juga banyak diberikan Jepang dalam upaya membantu negara-negara berkembang di berbagai kawasan dunia, untuk itu banyak negara yang mendukung keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB terkait dengan banyaknya sumbangan yang telah diberikan Jepang kepada negara-negara di dunia.

Banyaknya kontribusi ODA yang diberikan Jepang kepada banyak negara, telah memperkuat langkah dan keinginan Jepang untuk memperoleh dukungan dari banyak negara untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini terlihat dalam ungkapan Kono Yohei Wakil Perdana Menteri Jepang dan juga Menteri Luar Negeri Jepang, yang menyatakan bahwa Jepang telah disiapkan dan telah disahkan dengan banyak negara, untuk memegang tanggung jawab sebagai anggota yang permanen di Dewan Keamanan karena tanggung jawabnya yang telah dibuktikan melalui kontribusi ODA.

### iii. Melalui Kontribusi PKO (Peace Keeping Operation)

Selain melalui kekuatan ekonomi, Jepang juga mengandalkan kontribusi pasukan penjaga perdamaianya yaitu SDF (*Self Defense Force*) sebagai bentuk upaya diplomasi Jepang di PBB untuk menjadi anggota tetap DK-PBB. Walaupun dalam hal ini Jepang mengalami banyak hambatan baik dari dalam negeri Jepang sendiri yang sebagian masyarakatnya tidak menginginkan Jepang terlibat dalam kekuatan militer dan juga konstitusi 9 antara Jepang dan Amerika.

Menteri Luar Negeri Jepang Machimura Nobutaka mengatakan,

*“Japan has become more involved with global affairs in a bid to gain a permanent seat on the UN Security Council. In the process, Japan seeks to rid itself of its “historical baggage” and reconcile the ideologies of the Peace Constitution.”*

Terjemahan: Jepang telah menjadi negara yang lebih dilibatkan dalam hubungan global dalam suatu penawaran untuk memperoleh suatu tempat duduk permanen atas keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB. Di dalam prosesnya, Jepang mencari upaya untuk membersihkan dirinya sendiri tentang “bagasi historis” dan menjalankan ideologi Konstitusi Damai Jepang.

Macimura juga menambahkan bahwa “Jepang perlu merevisi konstitusinya, kalau Jepang ingin menjadi anggota tetap DK-PBB karena itu akan lebih baik agar tidak menyimpan ambiguitas.” (Diplomatic Bluebook: 2005:144)

Dengan mengandalkan kontribusi PKO yang tidak berjalan dengan menggunakan kekuatan militer Jepang merasa itu lebih dari cukup untuk mempertimbangkan peranannya dalam ikut serta memelihara perdamaian. Dan Jepang merasa hal itu juga sudah cukup untuk membuktikan Jepang untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukannya semasa perang dahulu.

Peristiwa penting pada tahun 1992 yaitu, dimana dimulainya penyebaran PKO telah menjadi titik balik bagi aktivitas militer Jepang yang dinamakan Pasukan Beladiri Jepang (SDF). Peristiwa ini pada prinsipnya dibentuk oleh tuntutan internasional yang meminta Jepang untuk mengakhiri kegiatan SDF yang

bersifat *free riding* selama masa Perang Dingin dan memulai komitmen penuhnya pada kewajiban global di era baru. Pada era 1990an juga merupakan langkah awal bagi Jepang dalam menentukan politik luar negeri Jepang yang baru, di mana Jepang mulai mempertimbangkan peran dan kontribusi militernya di dunia internasional.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan Jepang dalam mengirimkan pasukan perdamaianya adalah berdasarkan hasil undang-undang sebagai berikut;

1. Tujuannya adalah memberi sumbangan konkrit kepada kegiatan atau misi PBB yang mengandung nilai kemanusiaan,
2. untuk mencapai tujuan itu dilaksanakan usaha bekerjasama dalam kegiatan pemeliharaan perdamaian dan keamanan PBB,
3. dalam pelaksanaan partisipasi tersebut harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
  - a. Harus ada keputusan Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu;
  - b. Harus ada permintaan dari sekjen PBB kepada pemerintah Jepang;
  - c. Harus ada gencatan senjata antar pihak-pihak yang bersengketa;
  - d. Harus ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan tersebut pada butir c;
  - e. Harus bersikap netral.<sup>14</sup>

SDF secara resmi berdiri pada bulan Juli 1954, namun cikal bakal berdirinya SDF sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1950 dengan dibentuknya NPR (*National Police Reserve*). Akan tetapi terkait dengan konstitusi Jepang-AS pasca Perang Dunia II, membuat langkah-langkah yang diambil SDF terbatas.<sup>15</sup> Keinginan Jepang untuk meningkatkan kembali otonomi militernya tidak terlepas dari kepentingan Jepang dalam upaya memenuhi “standar global”

<sup>14</sup> Japan's PKO Cooperation Bill, 1992

<sup>15</sup> Hitoshi Abe, Mineyuki Shindo, Sadafumi Kawato, *The Government and Politics of Japan*, diterjemahkan oleh James W. White, Tokyo, University of Tokyo Press, 1994, hal. 102-103

dalam menanggapi tuntutan baru di dunia internasional. Rancangan undang-undang<sup>16</sup> pada tahun 1991 yang diusulkan untuk ditinjau kembali setelah kepulauan Jepang dari kawasan Teluk yang salah satu isinya yaitu, mengenai perubahan istilah *Peace Keeping Force* yang dirubah menjadi *Peace Keeping Operation* tidak lain merupakan bentuk upaya Jepang agar negaranya mampu ikut memberikan kontribusinya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia yang diselenggarakan oleh PBB secara maksimal.

Posisi Jepang dalam kerjasama internasional khususnya di DK-PBB merupakan pilar diplomasi kebijakan luar negeri yang utama karena banyaknya kontribusi yang jelas yang telah diberikan Jepang kepada PBB baik itu melalui kontribusi ekonomi dan juga melalui peranan pasukan perdamaian Jepang yang telah banyak membantu upaya penyelesaian konflik dan proses perdamaian dunia.(BlueBook 2005:142)

Kono Yohei dalam sidang umum PBB yang ke 49 tahun menyebutkan beberapa dasar filosofi dari upaya kontribusi internasional yang dilakukan Jepang pada dunia internasional yaitu;<sup>17</sup>

1. Jepang tidak akan menggunakan kekuatan yang dilarang oleh konstitusi nya dan akan tinggal dengan tegas sebagai suatu bangsa yang cinta damai;
2. Jepang berniat untuk melanjutkan untuk bekerja sama dengan aktif di dalam upaya pemeliharaan perdamaian PBB yaitu PKO, melalui SDF.
3. Jepang akan meningkatkan kontribusinya dalam area seperti perlucutan senjata, pengembangan, lingkungan dan hak azasi manusia

Walaupun pada awalnya kontribusi militer Jepang merupakan kontribusi yang paling tenang diantara kontribusi lainnya, tetapi Jepang telah berhasil banyak memberikan perubahan baik dalam konstitusi Jepang sendiri juga kepada upaya

<sup>16</sup> William L Heinrich, Jr., Akihiko Shibata, and Yoshihide Soeye, *United Nations Peace Keeping Operations: A Guide to Japanese Politics*, United Nations University Press, Tokyo, 1999, hal.9

<sup>17</sup> “*United Nations and Japan*”, Ministry of Foreign Affairs, Japan, 1995, hal.26

memulihkan pandangan masyarakat Jepang yang mengalami sentimen militer semenjak tragedi bom atom yang terjadi di masa lalunya.

Seperti pernyataan berikut yang terdapat pada buku laporan tahunan UNDP tahun 1993 yang menyatakan;

*“The concept of security must change- from an exclusive stress on national security to a much greater stress on ‘people’s security, from security through armaments to security through human development, from territorial security to food, employment and environmental security’.*(UNDP 1993:2)

Terjemahan: Konsep keamanan harus berubah dari suatu tekanan eksklusif pada keamanan nasional menjadi suatu tekanan yang jauh lebih besar menuju pada ‘keamanan masyarakat’, dari keamanan melalui peralatan perang menjadi keamanan melalui pengembangan manusia, dari keamanan wilayah ke makanan, ketenaga-kerjaan dan keamanan lingkungan.

Untuk memperkuat perannya di PBB, masyarakat Jepang merasa bahwa Jepang harus dapat memberikan kontribusi yang lebih lagi baik itu dari segi keuangan maupun penyediaan personil untuk upaya perdamaian, hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Jepang memiliki tanggung jawab kepada dunia. Setelah kontribusi militer Jepang yang diberikan secara penuh bersamaan dengan meningkatnya kontribusi ekonomi Jepang, maka kursi tetap di Dewan Keamanan PBB akan menjadi layak dan tidak perlu dipertanyakan lagi.<sup>18</sup>

Shigeru Nambara seorang Pemimpin dari Universitas Tokyo dalam bidang politik dan sejarah pernah mengungkapkan penentangannya terhadap konstitusi 9 pada tahun 1948, bahwa menurutnya;

“Jepang harus menolak konstitusi 9, hal ini untuk mengantisipasi partisipasi Jepang di PBB pada masa yang akan datang, Jepang harus mampu menyediakan negaranya walaupun dengan persenjataan yang minim tetapi memiliki hak pertahanan yang kuat, semua ini agar di masa

---

<sup>18</sup> Fujita Hiroshi, *loc.cit.*

yang akan datang Jepang dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku di PBB.”<sup>19</sup>

Bagaimanapun upaya kontribusi militer yang dilakukan Jepang dalam dunia internasional, merupakan bentuk upaya Jepang untuk mengimbangi peranan ekonomi Jepang yang telah terlebih dahulu mengalami kemajuan yang pesat dalam lingkungan internasional. keberhasilan Jepang dalam membangun perekonomian dunianya dan kemampuannya menjadikan kontribusi ekonomi sebagai diplomasi multilateral, membuat Jepang merasa perlu memperluas peranannya lebih dari hanya sekedar “ekonomi power”, tetapi juga Jepang harus menunjukkan kepeduliannya dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui pasukan perdamaian di bawah komando PBB. Yoichi Funabashi (1994:11) memaparkan beberapa strategi baru Jepang dalam agenda internasionalnya dalam upaya menghadapi berbagai isu dan tantangan baru di dunia internasional sebagai berikut;

1. *Global Civilian Power*; “Japan must express its cherished values and self-enlightened interests”.... “Japan’s economic interests are global, and they require Japan’s global commitment. Thus, Japan’s power must be global in dimension...”
2. *Multiple Value-Oriented Diplomacy*; yaitu Jepang harus memperluas lagi strategi internasionalnya dari dimensi ekonomi sampai pada mempromosikan kontribusi militernya sebagai aksi nonmiliter dalam upaya membantu perdamaian dunia.
3. *Full Partnership and Supportive Leadership*, yaitu Jepang harus terus menjaga dan meningkatkan hubungannya dengan AS yang dianggap sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang kuat, yang merupakan payung bagi keamanan Jepang sendiri.
4. *Pacific Globalism*, yaitu Jepang harus memperkuat diplomasinya di kawasan Asia.

---

<sup>19</sup>Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal.16

Perdana Menteri Jepang Noboru Takeshita<sup>20</sup> pada tahun 1988 dalam pidatonya di PBB menyatakan, bahwa Jepang memiliki tiga pilar diplomasi di PBB, yaitu untuk; “kerjasama pemeliharaan perdamaian dunia; meningkatkan ODA; dan mempromosikan pertukaran budaya”. Di mana semuanya itu merupakan langkah Jepang dalam mempromosikan perannya di dalam stabilitas internasional dan sebagai upayanya memperkuat perannya di PBB khususnya Dewan Keamanan PBB.

Jepang mulai menyatakan kembali keinginannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada masa 1990-an, hal ini dikarenakan pada awal tahun 1990-an Jepang telah menjadi negara dengan tingkat kontribusi ekonomi terbesar ke-dua di PBB, dan pada masa ini juga Jepang mulai memperjuangkan peranan militernya untuk dapat secara penuh memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan yang dilakukan PBB. Ke-dua hal baik ekonomi dan militer yang diperjuangkan Jepang merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Jepang dalam memperkuat dan memperluas peranannya di PBB khususnya untuk mencapai keinginannya meraih kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

Kalau pada masa 1980-an strategi diplomasi Jepang adalah meningkatkan kemampuan ekonominya, maka pada masa 1990-an Jepang mulai berkeinginan untuk memperkuat kembali peranan militernya. Jepang beranggapan bahwa untuk bisa mendapatkan kursi tetap Dewan Keamanan PBB berarti Jepang diharapkan mampu memberikan partisipasi penuh dalam upaya perdamaian yang diselenggarakan oleh PBB melalui PKO secara terus menerus.<sup>21</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari MOFA sebagai berikut;

*“The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) hoped that this gradual expansion of support would eventually translate into broad acceptance by other UN members that Japan deserved a seat on the council”.*<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Akihiko Tanaka, *Japan's International Agenda: Japan's Security Policy in the 1990s*, New York University Press, 1994 hal. 34

<sup>21</sup> Aurelia George, “international peacekeeping and japan's role” *Asian Survey*, vol.35,no.12 (December 1995), hal.118

<sup>22</sup> Amy E Searight, *loc. cit*

Terjemahan: Kementerian Luar Negeri (MOFA) berharap agar perluasan pendudukan yang dilakukan secara berangsur-angsur ini akan secepatnya diterjemahkan ke dalam penerimaan yang luas oleh negara anggota PBB lainnya bahwa Jepang layak memperoleh suatu tempat duduk di dewan.

Sebuah dilema panjang yang dihadapi Jepang pada kemiliterannya, tidak lain merupakan sebuah upaya Jepang untuk dapat memainkan peranan yang lebih aktif lagi di PBB. *Ministry of Foreign Affairs (MOFA)*<sup>23</sup> mengungkapkan: “bahwa SDF Jepang diharapkan dapat memberikan kontribusinya secara kontinu di bawah bendera PBB khususnya di dalam manajemen kemiliteran”.

Jepang meyakini bahwa kontribusi yang telah diberikan negaranya terhadap PBB sangat besar dan tidak bisa diragukan lagi. Diplomasi multilateral yang dilakukan Jepang telah sesuai dengan tuntutan zaman yang terjadi di masa sekarang ini, bagi Jepang diplomasi PBB merupakan strategi dua pilar yang ingin dicapai oleh Jepang yaitu menegaskan posisinya sebagai negara kuat di kawasan Asia dan juga sebagai negara maju yang demokratis seperti negara-negara barat. Untuk itu melalui kontribusi ekonomi dan militer, Jepang berharap lingkungan internasional dapat mempertimbangkan peran Jepang dan mengakui kelayakannya untuk mencapai keinginan Jepang selama ini untuk menjadi anggota tetap di DK-PBB.

Berikut adalah beberapa bentuk perjalanan kontribusi militer Jepang di PBB melalui SDF;<sup>24</sup>

1. Pada tahun 1992, SDF Jepang berhasil merevisi konstitusinya agar mampu menjalankan tugas sampai ke luar Jepang di bawah bendera PBB;
2. 1992-1993 SDF ikut berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian di Kamboja;

<sup>23</sup>Asia Pacific Review, *Japan's United Nations Peacekeeping Dilemma*, vol,8,no.1, Published by Carfax Publishing, Tylor and Francis Ltd, New Fetter Lane, London, 2001. hal.1

<sup>24</sup> Glenn D Hook, *op. cit*, hal. 12-14

3. 1993-1995 SDF ikut berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian di Mozambique;
4. 1994 SDF ikut berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian di Rwanda;
5. 1996 SDF ikut berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian di Golan dan Lietenberg;
6. 2002-2004 ikut berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian di Timor-Timur;
7. SDF mendukung aksi anti terorisme setelah tragedi 11 September di Amerika Serikat;
8. 2001 mengirimkan unit SDF ke lautan India untuk penyediaan barang logistic dalam mendukung AS dalam menekan Afganistan;
9. Semenjak 2003 Jepang berhasil mengirimkan pasukan SDFnya untuk mendukung penyediaan barang logistic untuk AS dalam menekan Iraq;
10. January 2005 sebanyak 950 anggota SDF dikirimkan Jepang ke Indonesia, untuk pemulihan akibat bencana alam tsunami.

Jepang menempatkan pemberian anggaran militernya pada prioritas ke dua, namun hal ini tidak menjadikan Jepang lepas dari tanggung jawabnya dalam memberikan kontribusinya dalam kemiliteran Jepang yaitu SDF dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Seperti terlihat dalam bagan berikut ini mengenai total jumlah anggaran yang diberikan dari tiap-tiap negara dimana Jepang menempati urutan ke-3 dari Lima besar negara yang ketiga negaranya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB:

**Tabel 4.5 Total Jumlah Anggaran Untuk Badan Militer PBB**

Negara	Total pembelanjaan (US \$ milion)	Pembelanjaan per kapita (US\$)	Perbandingan ke GDP (%)
USA	261,380	958	2,9
UK	34,015	574	2,5
Jepang	30,944	244	0,99
Prancis	28,651	475	2,2
Jerman	23,762	289	1,2

Sumber: *Facts and Figures of Japan 2002, Foreign Press Center, Japan*

Beberapa kesimpulan mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi alasan dari kementerian luar negeri Jepang (MOFA) mengapa Jepang layak menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah;<sup>25</sup>

1. Jepang memiliki persepektif global sebagai negara dengan ekonomi kuat di dunia;
2. Jepang adalah negara yang simpatik kepada keadaan negara berkembang dan bersedia menjadi penyedia bantuan pengembangan yang terkemuka seperti ODA;
3. Jepang berani menjadi negara dengan kekuatan non-nuklir;
4. Jepang adalah negara Asia yang demokrasi;
5. Jepang telah membayar sebanyak 20% untuk anggaran PBB;
6. dan Jepang telah menyediakan pasukannya (SDF) untuk membantu upaya perdamaian PBB secara kontinyu.

Dalam upaya memberikan kontribusinya secara penuh di PBB Jepang juga berpegang teguh pada kebijakan untuk tidak pernah menggunakan kekuatan militer sejak akhir Perang Dunia II, Jepang juga mencegah meningkatnya konflik-konflik internasional dengan tidak menjadi pemasok persenjataan, tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan persenjataan hal ini merupakan

<sup>25</sup>Satoh Yukio, *loc. Cit.*

bentuk “Prinsip Ekspor Senjata Jepang” sebagai upaya untuk melakukan usaha keras bagi penghapusan persenjataan nuklir secara total, dan sebagai satu-satunya negara yang pernah menderita karena bencana pemboman nuklir. Jepang berusaha mengabdikan diri bagi perdamaian dan stabilitas internasional secara konsisten hal ini dibuktikan dengan 9 kali menjadi anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB tidak tetap yang diperolehnya atas dukungan negara-negara Asia. Secara keuangan Jepang menanggung 20% dari total anggaran PBB.<sup>26</sup>

#### 4.2. ODA dan PKO sebagai Diplomasi Damai Jepang di PBB

Pada awal abad ke-20 Jepang melihat dunia sebagai suatu gelanggang dari kekuatan politik dimana kekuatan ekonomi dan militer menjadi dasar dari kekuatan suatu negara. Sadar akan hal itu dalam menjalankan hubungan multilateralnya Jepang menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara melakukan diplomasi yang sesuai bagi konstitusi negaranya yaitu melalui ODA dan PKO.

Bagi Jepang kontribusi yang diberikan Jepang melalui ODA dan PKO, merupakan sebuah upaya diplomasi damai Jepang untuk membuktikan tanggung jawabnya kepada dunia internasional. seperti yang ditegaskan oleh Direktur umum JDA (*Japan Defense Agency*)<sup>27</sup> yang mengatakan bahwa, “ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional melalui SDF adalah hal yang sangat vital untuk mengisi tanggung jawab Jepang sebagai anggota internasional dan dalam upaya mewujudkan diplomasi damai Jepang.”

Selanjutnya dalam piagam baru ODA<sup>28</sup> juga tercantum sebuah pernyataan yang menyiratkan bahwa kontribusi ODA yang diberikan Jepang selama ini merupakan upaya yang dilakukan Jepang dalam membantu terbentuknya perdamaian dunia. Dari kedua pernyataan tersebut ODA dan PKO Jepang terhubung dengan diplomasi damai yang ingin dicapai Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya.

<sup>26</sup> Julie Gilson, *op. cit.*, hal.27-39

<sup>27</sup> Takao Takahara, *loc. cit.*

<sup>28</sup> ODA White Paper 2002, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 2004.

Melalui ODA dan PKO ini, Jepang berupaya untuk dapat memainkan peranan yang lebih penting dalam dunia internasional khususnya dalam organisasi internasional PBB yang merupakan wadah bagi seluruh kegiatan masyarakat internasional. Khususnya dalam Dewan Keamanan PBB, dengan pencapaian kontribusi yang besar Jepang berharap ini dapat menjadi pertimbangan bagi anggota PBB lainnya dalam mendukung upaya Jepang untuk meraih kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Seperti sebuah pernyataan dari seorang pejabat senior dari harian *Daily Yomiuri*<sup>29</sup> yang menyatakan bahwa, “upaya Jepang mencapai kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, akan mendapat dukungan penuh dari negara-negara berkembang, karena ini membuktikan pencapaian yang telah diberikan Jepang melalui ODA.”

Pemerintah Jepang menjadikan upaya diplomasi damai Jepang ke dalam tiga pilar yaitu:<sup>30</sup>

1. Mempromosikan proses perdamaian; melalui kegiatan seperti mediasi dan membantu pemilihan,
2. Memperoleh stabilitas dan keamanan dalam dan luar negeri melalui pelucutan senjata dan pasukan perdamaian PKO (*Peace Keeping Operations*) melalui PBB,
3. Bantuan kemanusiaan melalui bantuan rekonstruksi, perbaikan akibat bencana alam, dan bantuan ODA terhadap negara-negara berkembang juga kepada organisasi-organisasi internasional.

Dengan demikian semua pencapaian yang telah dilakukan Jepang melalui kontribusinya baik melalui ODA dan juga SDF dibawah payung PBB yaitu PKO, merupakan bentuk upaya diplomasi yang dilakukan Jepang untuk meraih peranan yang lebih penting dalam keanggotaannya di PBB khususnya Dewan Keamanan PBB. Melalui ke-dua cara ini Jepang ingin membuktikan bahwa diplomasi damai yang dilakukan Jepang selama ini sangat berperan dalam ikut berpartisipasi terhadap kelangsungan perdamaian dunia.

---

<sup>29</sup> Julie Gilson, *op. cit.*, hal. 38

<sup>30</sup> Julie Gilson, *ibid.*, hal.45